

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT
PELANGGARAN *GOTONG WALI* PADA PERKAWINAN SUKU JAWA
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Pancuran Gading Kec.Tapung Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



Oleh

S A R W O N O
NIM. 10421025055

**PROGRAM S.1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1430/ 2009 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Keputusan Hubungan Kekeluargaan Akibat Pelanggaran *Gotong Wali* Pada Perkawinan Suku Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pancuran Gading Kec. Tapung Kabupaten Kampar).

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya larangan adat untuk melaksanakan pernikahan atau *Walimatul 'Urusy* yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (Kakak / Adik) dalam satu tahun baik pernikahan itu dilaksanakan secara bersama-sama atau tidak atau berbeda tempatnya, harinya dan bulannya, karena menurut pandangan adat pernikahan semacam ini dianggap tabu dimata masyarakat sehingga jika dilaksanakan akan memberi dampak yang tidak baik bagi pengantin, orang tua dan seluruh keluarga. Pernikahan semacam ini dalam adat orang Jawa dikenal dengan istilah "*Gotong Wali*".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pancuran Gading Kec. Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keputusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran *Gotong Wali*, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut serta Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *Gotong Wali* pada Suku Jawa.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keputusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran *Gotong Wali*, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut serta Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *Gotong Wali* pada Suku Jawa.

Melihat banyaknya dampak yang terjadi dari pernikahan tersebut maka adat melarang untuk melaksanakan pernikahan semacam itu, karena dampak yang akan terjadi adalah salah satu pihak harus ada yang meninggal dalam artian akan ada yang (meninggal, sakit atau yang lainnya), dan hal itu bisa saja terjadi kepada pihak suami istri, orang tua atau keluarga nya.

Namun hal itu sebenarnya adalah takdir dari yang maha kuasa. Tapi awal dari semua itu adalah akibat dari pelanggaran adat sehingga hal itu menjadi suatu yang dilarang dalam masyarakat Jawa di Desa Pancuran Gading.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap *Gotong Wali* adalah: bahwa di dalam Islam tidak ada larangan menikah secara *Gotong Wali* tetapi Islam hanya mengatur Rukun dan Syarat serta bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam pernikahan oleh karna itu Islam tidak melarang nikah *Gotong Wali* karena adat tersebut merupakan adat yang fasid karna mengharamkan sesuatu yang halal yaitu tidak membolehkan nikah secara bersama-sama adik atau kakak pada hari bulan tahunnya bersamaan walaupun dengan alasan untuk kemaslahatan demi tercapainya tujuan pernikahan yang mulia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Geografis	13
A. Demografis	14
B. Agama	17
C. Pendidikan	19
D. Mata Pencarian	21
E. Sarana Kesehatan	22
F. Lembaga Pemerintahan	23
G. Sarana Kegiatan Sosial	23
H. Kebudayaan	24

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG *GOTONG WALI* DAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian <i>Gotong Wali</i>	26
B. Pengertian Nikah Menurut Hukum Islam	29
C. Dasar Dan Hukum Nikah	32
D. Rukun Dan Syarat Nikah	40
E. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	45
F. <i>Walimatul' Urusy</i>	52
G. Bentuk-Bentuk Nikah Yang Di Larang	58

**BAB IV :PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT
PELANGGARAN *GOTONG WALI* PADA PERKAWINAN
SUKU JAWA**

A.Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran <i>Gotong Wali</i>	66
B.Persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut.	70
C.Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Gotong Wali</i>	74

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan	82
B.Saran	83

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Pancuran Gading merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kab. Kampar Desa ini merupakan Desa yang dikembangkan melalui Program Transmigrasi pada Tahun 1988, penduduk Pancuran Gading merupakan penduduk yang *Heterogen* yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa yakni ada suku Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Melayu, Minang, dan Batak. Namun mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam (93 %) dan yang memeluk Agama Kristen Katolik dan Prortestan (7%).¹

Sebagaimana umumnya pada semua daerah yang berada di Kab. Kampar, Agama merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Pancuran Gading, saat ini sebuah Pondok Pesantren dan sebuah Madrasah (MTS dan MAS) telah berdiri di Desa Pancuran Gading sebagai wujud kepedulian dan perhatian warga terhadap Agama. Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, penyambutan tahun baru Islam, Sepuluh Muharam dan lain sebagainya selalu dirayakan dengan berbagai macam acara yang khidmad dan meriah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pancuran Gading mempunyai perhatian yang kuat terhadap keyakinan yang mereka anut.

¹ M. Suratno, Tokoh / Pemuka Masyarakat (KADES), *Wawancara*, (Pancuran Gading: 7 Oktober 2008).

Disamping Agama masyarakat Desa Pancuran Gading juga memegang teguh adat istiadat yang mereka terima secara turun temurun dari para leluhur mereka. Dalam keyakinan mereka adat istiadat yang mereka anut merupakan suatu yang harus dilestarikan karena hal itu suatu yang luhur yang mereka warisi dari pada pendahulu dan tidak bertentangan dengan Agama.²

Diantara adat tersebut ada yang berupa pantangan yang harus di patuhi dan di jauhi, pantang dalam Bahasa Indonesia adalah suatu yang terlarang menurut keyakinan adat.³ seperti halnya melaksanakan pernikahan dan *Walimah* secara bersamaan antara dua orang bersaudara dalam satu tahun dalam istilah Jawa (*Gotong Wali*)⁴ baik itu terhadap anak laki ataupun anak perempuan. Tahun yang dimaksud di sini adalah Tahun Jawa atau Tahun Hijriah bukan Tahun Masehi karna Tahun Hijriah adalah Tahun hitungan yang di pakai oleh orang Jawa, orang Jawa mengawali Tahun itu adalah Bulan Muharam (*Sura*), Shafar (*Sapar*), Rabiulawal (*Mulud*) Rabiul Akir (*Ba'da Mulud*), Jumadil Awal (*Jumadil Ula*), Jumadil Akhir (*Jumadil Akhirah*), Rajab (*Rejeb*), Sya'ban (*Ruwah*), Romadhon (*Pasa*), Syawal (*Sawal*), Dzulqaidah (*Dulkamgidah*) ,Dzul Hijah (*Besar*). Pelaksanaan nikah dan walimah secara bersama tersebut dilarang oleh adat, yang apabila dilaksanakan maka akan memberi dampak negatif akibat melanggar

² *Ibid.*

³ Tim penyusun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media,1983),Cet.Ke-2 h. 580

⁴ *Gotong Wali* ialah: *Pernikahan atau walimatul' urusy yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (kakak / adik) dalam satu tahun baik pernikahan itu di laksanakan secara bersama-sama atau tidak atau berbeda tempatnya, harinya, dan bulannya.*

adat. Orang yang melanggar terhadap hukum adat akan disebut dengan sebutan orang yang “Tidak Beradat” karna melanggar larangan yang vital dimata masyarakat yang beradat.

Jika ada dua orang bersaudara (Adik dan Kakak) melakukan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan walaupun pada tempat, hari bulan yang sama atau berbeda dalam artian bersanding dalam Tahun yang sama Apabila diantara dua anak itu tidak ada yang mengalah untuk mengundurkan nikahnya pada tahun depan maka salah satu dari mereka rela tidak dibiayai, dihadiri dan dirayakan serta orang tuanya tidak menjadi wali dalam pernikahannya sehingga orang tua terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya karna ia dianggap bukan anaknya untuk menghindari *kualat* (kesialan / mala petaka) bagi dirinya. tetapi apabila dilakukan pernikahannya pada tahun Jawa atau Hijiriah yang berbeda walaupun selang satu bulan maka pernikahan (Adik / Kakak) itu tidak dilarang secara adat. menurut salah satu warga Desa (Pak Darjo) bahwa pernikahan seperti ini tanpa memisahkan tahun pernikahan tersebut memberi dampak buruk bagi keluarga yang mana salah satunya akan ada yang sakit bahkan meninggal dunia baik itu orang tuanya, kakaknya atau adiknya bisa juga anak salah satu dari mereka.⁵

Seperti pernikahan yang dilakukan oleh anak dari Bapak Mursidi yaitu yang bernama (Ismawati dan Indri), Ismawati menikah di Pancuran Gading kampungnya sendiri dan orang tuanya yang menjadi walinya sedangkan

⁵ Darjo, (Tokoh Masyarakat Jawa), *wawancara*, (Pancuran Gading: 12 Oktober 2008).

Indri menikah di Jambi di tempat suaminya yang menjadi wali nikahnya adalah abangnya pernikahan mereka terjadi pada Bulan Pebruari (Safar) dan Maret (*Mulud*) Tahun 2008, maka oleh orang tuanya pernikahan Ismawati dirayakan sedangkan pernikahan Indri tidak di hadiri dan dirayakan oleh orang tuanya, Karna Indri dianggap bukan anaknya untuk menghindari *Kualat* (Pantang), yang akan nantinya menimpah kelangengan rumah tangganya Indri.

Kemudian pernikahan anak dari Bapak Gito yaitu (Sakroni dan Janah) melaksanakan pernikahan pada Bulan Maret (*Mulud*) Tahun 2007 mereka melakukan resepsi pernikahan dan *Walimatul' Urusy* masih di daerah Sai Galuh secara bersamaan, Adapun hal-hal yang dialami setelah melaksanakan pernikahan itu salah satu dari mereka ada yang mengalah, tanpa ada suatu sebab dan komplik rumah tangga adiknya pergi meninggalkan istrinya begitu saja dan setelah beberapa bulan adiknya meninggal dunia. Sedangkan Sakroni sering sakit-sakitan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja keras, menurut orang tua Jawa ia sakit karna telah melanggar adat.⁶

Selain itu juga pernikahan terhadap Bapak Tumijan yang menikah dua orang anak perempuannya pada Tahun 2005 yang bernama (Supriatin dan Ponirah) pada bulan yang berbeda tetapi pada tahun yang sama, adiknya Supriatin menikah di Pancuran Gading (Desa sendiri) yang menjadi walinya bapaknya sedangkan kakanya Ponirah menikah di Kandis yang menjadi

⁶ *Ibid.*

walinya kakeknya, masing-masing telah dikaruniai anak namun anak dari Supriatin meninggal dalam usia 8 Bulan.⁷

Akibat pelanggaran pernikahan *Gotong Wali*, anak tidak dapat dinikahkan keduanya oleh orang tuanya, salah satu anak harus rela tidak dinikahkan oleh bapaknya, pemberian hak perwalian terhadap pernikahan salah satu anaknya orang tua menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain bisa kepada anaknya yang laki – kali, Sodaranya dan Kakeknya dari garis keturunan Ayahnya, Juga bisa kepada P3NCTR atau Wali Hakim untuk menjadi wali pernikahan anaknya.⁸

Dalam Islam tidak ada aturan yang menjelaskan tentang larangan melaksanakan akad nikah dan *Walimatul'urusy* dalam hari, bulan dan tahun yang sama tetapi yang ada hanya jumlah wanita yang boleh dinikahi dan siapa saja yang berhak menjadi wali apabila wali *Mujbir* tidak ada atau enggan untuk menikahkan anaknya.

Sebagaiman yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surat an-Nisa' ayat : 3.

فَانكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَّةً وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِتْعَادِلُوا

فَوَاحِدَةً

⁷ Tumijan, (Orang Tua Ponirah), *Wawan cara*, (Mataram: 20 Desember 2008).

⁸ Darjo, *loc.cit*

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja (an-Nisa ayat: 3)”.⁹

Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa karna dengan berpuasa diharapkan akan membentengi diri manusia dari perbuatan yang tercela dan keji.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. Rasulullah bersabda:

عن ابن مسعود قال لنا رسول الله ص.م يامعشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a beliau bersabda : wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu bisa membentengi diri” (HR. Bukhori).¹¹

Hadist di atas menjelaskan tentang anjuran dan hukum melaksanakan pernikahan dan dari sini tidak ada penjelasan mengenai larangan untuk melakukan pernikahan secara bersama dua orang bersaudara. Oleh karena

⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1997),Cet. Ke-1, h. 115.

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 1995),Cet. Ke-5, h.10

¹¹ Imam Bukhori, *Shoheh Al- Bukhori*, (Dar-Al Fikr, 1981), Cet.Ke-1, Jilid V, h. 117.

itu dalam ajaran Islam beberapa orangpun saudara yang akan melakukan pernikahan tidak akan berpengaruh.

Melaksanakan pernikahan dan *Walimatul' Urusy* merupakan salah satu Sunah Nabi SAW, *Walimatul' Urusy* sendiri ialah perayaan yang diselenggarakan untuk merayakan perkawinan dan memeriahkannya sebagai tanda gembiranya atas terjadinya perkawinan.¹² Menurut al-Azhary *Walimatul' Urusy* adalah *Liaana Azzaujaini Yajtami'aani* (karena kedua suami istri itu berkumpul)¹³ menurut Ulama Fiqih *Walimah* ialah “*perhelatan*” atau “*kenduri*” yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan.¹⁴ Sedangkan menurut Syari'ah *Walimah* adalah sebutan hidangan dalam pernikahan khusus (semua jenis makanan untuk peristiwa yang menyenangkan)¹⁵ oleh karena itu bagi pengikutnya yang taat, pernikahan merupakan salah satu jalan terbaik bagi yang sudah sanggup serta akan menjadi pengikut dan umat terpuji. Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ص. م.

النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya : “Dari Abi Hurairota ra, ia berkata: Rosulullah SAW bersabda “Pernikahan adalah termasuk sunnahku, siapa yang tidak mengikuti sunahku maka ia tidak termasuk golonganku (HR.Ahmad)”.¹⁶

¹² N.A Baiquni, I.A, Syawaqi, R.A. Aziz, *Kamus Istilah Agama*, (Surabaya: Indah, 1999), Cet. Ke-3, h. 478.

¹³ Imam Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: sirkatu nur amaliayah), Cet. Ke-2, Jilid II h. 68.

¹⁴ Kamal Mukar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-5, h.108

¹⁵ M. Thalib, *Fiqih Nabawi*, (Surabaya: al-Ikhlas), Cet. Ke-5, h.232.

¹⁶ Imam Ahmad Bin Hambal, *Al- musnad*, (Dar-Al-Fikr, 1981),Cet. Ke-3, VI, h. 379.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka untuk mengetahui secara luas tentang fenomena yang terjadi maka perlu diadakan penelitian mengenai masalah di atas yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul:

“PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PELANGGARAN *GOTONG WALI* PADA PERKAWINAN SUKU JAWA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM“

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan dan tidak terlalu meluas maka perlu dilakukan pembatasan-pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas yaitu mengenai **“Pemutusan Hubungan Kekeluargaan Akibat Pelanggaran *Gotong Wali* Pada Perkawinan Suku Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam “**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Permasalahan tersebut adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran *Gotong Wali* ?.
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut ?.
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *Gotong Wali* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran *Gotong Wali*
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *Gotong Wali* pada Suku Jawa

2. Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur Skripsi tentang hukum Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi Desa Pancuran Gading Kec.Tapung Kab. Kampar.

2. Subjek Dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pancuran Gading sedangkan Obyek penelitian ini adalah: Akibat Pelanggaran Terhadap Tradisi *Gotong Wali* Pada Perkawinan Suku Jawa.

3. Populasi dan Sample

Populasi masyarakat Desa Pancuran Gading berjumlah 1778 orang, dari semua populasi tersebut penulis mengambil 50 orang sample dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (menetapkan sample berdasarkan kebutuhan penelitian) untuk menjawab angket yang disebar, penulis mengambil 7 orang pemuka adat, 40 masyarakat dan 3 kasus yang melakukan nikah *Gotong Wali*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden, yaitu dengan memberikan angket dan mewawancarai masyarakat yang pernah melakukan *Gotong Wali*, dan Tokoh Pemuka Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dari literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapat informasi tentang permasalahan.

- b. Wawancara, penulis mengajukan langsung kepada responden dan informan, yaitu masyarakat yang pernah melakukan *Gotong Wali*, dan masyarakat umum, pemuka masyarakat dan pemuka Agama.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya,
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Profil lokasi penelitian, yaitu Desa Pancuran Gading Kec. Tapung Kab. Kampar meliputi kondisi Geografis dan Demongrafis, Pendidikan, Keagamaan, Sosial Budaya Dan Perekonomian.

BAB III : Tinjauan umum tentang *Gotong Wali* dan Nikah Menurut Hukum Islam, Pengertian nikah, Dasar dan hukum nikah, Rukun dan Syarat Nikah, Kedudukan Wali, Walimatul'urusy, Bentuk-Bentuk Nikah yang di larang.

BAB IV : Analisa, tinjau hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kekeluargaan akibat pelanggaran *Gotong Wali* Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut.

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelanggaran *Gotong Wali* pada Suku Jawa.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis

Desa Pancuran Gading merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kab. Kampar Desa ini merupakan Desa yang dikembangkan melalui Program Transmigrasi pada Tahun 1988, penduduk Pancuran Gading merupakan penduduk yang *heterogen* yang terdiri dari berbagai Suku dan Bahasa yakni ada suku Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Melayu, Minang, dan Batak.

Desa pancuran Gading meliputi III (Dusun) VI Rukun Warga (RW) dan XII Rukun Tetangga (RT), dengan luas keseluruhan adalah: 1007,25 Ha. Sedangkan jarak Desa ini dengan Kabupaten Kampar lebih kurang 220 KM dan jarak desa ini ke Ibu Kota Pekanbaru lebih kurang 25 KM. adapun batas- batas wilayah Desa Pancuran Gading adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Bencah Klubi
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Mataram
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Pantai Cermin
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Bencah Klubi

Desa Pancuran Gading seperi daerah lainnya di Indonesia yang beriklim sub-tropis sedang, sehingga kadang-kadang terdapat hujan pada Bulan September sampai Bulan April serta musim kemarau pada pada bulan Mei sampai Agustus. Sedangkan keadaan alam daerah Pancuran Gading,

sesuai dengan posisinya yang berada di tengah Desa sangat subur di jadikan lahan pertanian terbukti banyaknya masyarakat Desa lain bahkan orang Pekanbaru banyak yang membeli tanah untuk di jadikan perkebunan kelapa sawit.

B. Demografi

Jumlah penduduk Desa Pancuran Gading menurut Data Sensus Tahun 2008 adalah 1778 Jiwa 412 Kepala Keluarga yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa. Suku bangsa yang mendiami daerah Desa Pancuran Gading pada saat ini adalah sebagai berikut:¹

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH	PERSENTASI
1.	Melayu	452 Jiwa	25,42 %
2.	Jawa	1005 Jiwa	56,52 %
3.	Batak	202 Jiwa	11,36 %
4.	Minang	102 Jiwa	5,73 %
5.	Lain-lain	17 Jiwa	0,95 %
JUMLAH		1778 Jiwa	100%

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

¹ Data Statistik Kantor Desa Pancuran Gading 2008/2009.

Dari perbandingan jumlah penduduk tabel di atas, maka dapat diketahui keadaan penduduk Desa Pancuran Gading menurut suku bangsa.

Suku Jawa adalah suku terbesar jumlahnya, di susul dengan suku Melayu, Batak, Minang dan warga keturunan lain (Madura dan Lombok).

Suku Melayu merupakan kelompok mayoritas dan merupakan penduduk asli Desa Pancuran Gading, sebab suku ini yang pertama kali membuka daerah Pancuran Gading. Sedangkan suku-suku lainnya adalah pendatang dari berbagai daerah, Suku Jawa, Minang, Batak dan suku-suku lain.

Dari beragamnya penduduk yang datang dari berbagai daerah, tentu mempunyai bahasa, adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menggalang persatuan dan kesatuan yang kokok.

Sedangkan jumlah penduduk Desa Pancuran Gading berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Laki-laki	1005 Jiwa	56,52 %
2.	Perempuan	773 Jiwa	43,47 %
Jumlah		1778 Jiwa	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pancuran Gading sebanyak 1778 Jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1005 Jiwa (56,52 %) sedangkan jumlah perempuan sebanyak 773 Jiwa (43,47 %), dalam hal ini di Desa Pancuran Gading lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK PEMILIH

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Laki-laki	653 Jiwa	57,53 %
2.	Perempuan	482 Jiwa	42,47 %
Jumlah		1135 Jiwa	100%

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ikut memilih pada tahun 2008 / 2009 adalah sebanyak 1135 Jiwa, sedangkan yang belum termasuk kelompok pemilih sebanyak 643 Jiwa.

BEL IV

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	00 – 03 Tahun	82 Jiwa	4,61 %
2.	04 – 06 Tahun	173 Jiwa	9,73 %
3.	07 – 12 Tahun	103 Jiwa	5,80 %
4.	13 – 15 Tahun	97 Jiwa	5,45 %
5.	16 – 18 Tahun	85 Jiwa	4,78 %
6.	19 – Tahun keatas	1238 Jiwa	69,63 %
Jumlah		1778 Jiwa	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Dari perbandingan tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah kelompok umur 19 Tahun keatas yaitu sebanyak 1238 Jiwa (69 %). Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk yang terbanyak secara berturut-turut adalah kelompok remaja, kelompok umur 04 – 06 Tahun 173 Jiwa (9,73 %) kelompok umur 07-12 Tahun 103 Jiwa (5,80 %), kelompok 13 – 15 Tahun 97 Jiwa (5,45 %), kelompok umur 16 -18 Tahun 85 Jiwa (4,78%) dan kelompok umur 00 – 03 tahun 82 Jiwa (4,61 %).

C. Agama

Penduduk Desa Pancuran Gading adalah masyarakat yang agamis, hal ini terwujud dari kerukunan hidup beragama. Adapun agama yang

berkembang di Desa Pancuran Gading adalah agama Islam, Kristen Katolik dan Protestan.

Pada umumnya suku-suku yang ada di Desa ini adalah penganut agama Islam, untuk lebih jelasnya tentang penganut agama di Desa Pancuran Gading dapat dilihat melalui tabel berikut:

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Islam	1745 Jiwa	98,14 %
2.	Kristen Katolik	19 Jiwa	1,06 %
3.	Kristen protestan	14 Jiwa	0,78 %
Jumlah		1778 Jiwa	100%

Sumber Data: Monografi Kantor Kantor Desa Pancuran Gading Tahun

2008 / 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa penganut agama Islam berjumlah 1745 Jiwa (98,14 %) dan penganut agama non Islam 43 Jiwa (1,84 %). Walaupun di Desa Pancuran Gading memiliki agama yang berbeda, namun kerukunan hidup beragama yang dilandasi semangat toleransi tetap terwujud. Hal ini terbukti dengan tidak adanya konflik antar agama. Namun sebaliknya senantiasa terwujud keharmonisan dan sikap saling menghormati antar umat beragama.

Selain itu dengan banyaknya penganut agama Islam dari penganut agama lain di Desa Pancuran Gading menyebabkan sarana ibadah umat Islam yang banyak berdiri dibanding dengan sarana ibadah agama lainnya. Untuk lebih jelasnya sarana peribadatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI
JUMLAH SARANA PERIBADATAN

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Masjid	3 Buah	27,27 %
2.	Musholla	7 Buah	63,63 %
3.	Gereja	1 Buah	9,09 %
Jumlah		11 Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

D. Pendidikan

Sehubungan dengan pendidikan di Desa Pancuran Gading, sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa :” Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran ”.² Berarti ini merupakan kewajiban pemerintah hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara ini didirikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam pelaksanaannya, pemerintah telah membentuk suatu

² M. Solly Lubis, *Pembahasan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987) Cet. Ke-5, h. 277.

sistem pendidikan dan pengajaran Nasional yang dikenal dengan istilah pendidikan Formal dan Nonformal.

Pendidikan formal yang ada di Desa Pancuran Gading terdiri dari sarana pendidikan agama dan umum yang terdiri dari TK, SD, MTS, MAS, dan PESANTREN sedangkan pendidikan Non Formal terdiri dari PERIFAT- PRIFAT, dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya tentang wadah pendidikan Formal dan Nonformal di desa pancuran gading dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL VII
SARANA PENDIDIKAN

NO	JENIS SEKOLAH	NEGERI	SWASTA	PERSENTASE
1.	Taman Kanak-Kanak	-	1	12,5 %
2.	SDN	1	-	12,5 %
3.	MDA	-	2	25 %
4.	Tsanawiyah	-	1	12,5 %
5.	Aliyah	-	1	12,5 %
6.	Paket B / C	-	2	25 %
Jumlah		1 Buah	7 Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa ada 8 buah sarana pendidikan Formal mulai dari TK sampai SLTA yang bersetatus Negeri dan Swasta. Selanjutnya pendidikan yang Non Formal khususnya mengenai pendidikan

dan pengajaran agama dipusatkan di Mesjid dan Musholla, sedangkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bersifat umum adalah kursus menjahid, kursus Bahasa Inggris, kursus Komputer dan lain sebagainya.

E. Mata Pencarian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,. Masyarakat Desa Pancuran Gading melakukan berbagai macam usaha sebagai mata pencarian utama, yaitu sebagai Petani, Pedagang, Buruh Tukang, Guru, PNS, Karyawan Swasta, Dan Sopir. Sedangkan perbandingan mata pencarian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VIII
MATA PENCARIAN

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Petani Kelapa Sawit	1176 Jiwa	88,90 %
2.	Pedagang	15 Jiwa	1,13 %
3.	Tukang	2 Jiwa	0,16 %
4.	Karyawan Swasta	15 Jiwa	1,13 %
5.	Sopir	12 Jiwa	0,90 %
6.	Buruh	80 Jiwa	6,04 %
7.	PNS	9 Jiwa	0,69 %
8.	Guru	10 Jiwa	0,76 %
9.	Nelayan	4 Jiwa	0,30 %
Jumlah		1319 Jiwa	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading tahun 2008 / 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pancuran Gading yang bermata pencarian terbanyak adalah sebagai petani kelapa sawit, karena memang merupakan mata pencarian utama penduduk. Kemudian buruh hal ini dikarenakan banyaknya orang pendatang yang bekerja sebagai tukang manen kelapa sawit milik warga setempat.

Sedangkan mata pencarian terbanyak ketiga adalah pedagang, hal ini karena dekatnya desa-desa tetangga yang memiliki pasar masing-masing hanya hari saja yang berbeda dari mulai hari Senin sampai Minggu ada pasar di Desa yang buka.

Sedangkan jenis mata pencarian sebagai Karyawan Swasta, Guru, PNS, Tukang, Sopir hanyalah kelompok minoritas, karena masyarakat Desa Pancuran Gading sangat mapan dan boleh dikatakan kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi.

F. Sarana Kesehatan

TABEL IX
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Puskesmas	1. Buah	16,66 %
2.	Posyandu	2. Buah	33,34 %
3.	Bidan	3. Orang	50 %
Jumlah		6. Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Jika dilihat dari sarana dan prasarana kesehatan Desa Pansuran Gading sudah cukup memuaskan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

F. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan Desa Pancuran Gading dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL X

LEMBAGA PEMERINTHAN

NO	LEMBAGA EMERINTAHAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Kantor Desa	1.Buah	33,33 %
2.	Balai Desa	1. Buah	33,33 %
3.	Gedung PKK	1. Buah	33,34 %
Jumlah		3. Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

G. Sarana Kegiatan Sosial

Untuk mengetahui lebih jelasnya sarana kegiatan sosial di Desa Pancuran Gading dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL XI
SARANA KEGIATAN SOSIAL

NO	WADAH KEGIATAN SOSIAL	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Club Olahraga	5. Buah	29,41 %
2.	Kelompok Arisan	6. Buah	35,29 %
3.	Kelompok Pengajian	3. Buah	17,64 %
4.	Grup Kesenian	3. Buah	17,64 %
Jumlah		17. Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa wadah sosial; Desa Pancuran Gading sudah cukup memuaskan, terutama kelompok Olahraga dan klompok Arisan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kebersamaan dan perhatian terhadap kegiatan sosial cukup tinggi.

I. Kebudayaan

Adapun kebudayaan yang terdapat di Desa Pancuran Gading dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL XII
SARANA KEBUDAYAAN

NO	SARANA KEBUDAYAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Seni Kompang	1. Buah	33,33 %
2.	Seni Rebana	1. Buah	33,33 %
3.	Kuda Kepang	1. Buah	33,34 %
Jumlah		3. Buah	100 %

Sumber Data: Monografi Kantor Desa Pancuran Gading Tahun 2008 / 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga sarana kebudayaan diantaranya seni Kompang yang merupakan seni kebudayaan Melayu, seni Kompang mirip dengan Rebana, hanya saja lagu-lagu Kompang di ambil dari Al-Barzanji dan tidak mengambil lagu-lagu yang berbahasa lain. Kemudian seni Rebana yang dimainkan oleh kaum Ibu-ibu dan Remaja putri yang hingga saat ini masih eksis. Kesenian ini memiliki persamaan dengan seni Kompang yaitu alat yang digunakan dan lagu-lagu yang dinyanyikan sama-sama memiliki nilai-nilai keislaman, perbedaannya hanya lagu yang dinyanyikan pada seni Rebana berbahasa (Arab dan Indonesia), sedangkan lagu pada seni kompang yang di nyanyikan di ambil dari Syair-syair kitab Al-Barzanji.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *GOTONG WALI* DAN NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Gotong Wali*

Nikah *Gotong Wali* ialah : Pernikahan atau Walimatul' Urusy yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (Kakak / Adik) dalam satu tahun baik pernikahan itu di laksanakan secara bersama-sama atau tidak atau berbeda tempatnya, harinya, dan bulannya.

Dalam artian pernikahan atau Walumatul' Urusy tersebut ada terdapat empat orang pengantin yang bersanding sekaligus.¹

Menurut Bapak Darjo nikah *Gotong Wali* dapat diartikan berpisahanya dua orang bersaudara sekaligus dari orang tua untuk membentuk kehidupan baru. Menurut beliau *Gotong Wali* itu dapat juga diartikan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada kedua anaknya, karena tidak lagi tinggal bersamanya. Maka dengan itu ia akan merasa sangat kehilangan anaknya dikarenakan anak-anaknya sudah tidak lagi tinggal bersamanya., namun sudah tinggal dengan istri atau suaminya. Dengan perginya kedua anaknya itu maka menurut adat tidaklah baik karena jika kedua orang bersaudara pergi sekaligus, maka nantinya akan ada malapetaka yang akan menyimpannya salah satu dari keduanya. Menurut Bapak Darjo nikah *Gotong Wali* bisa saja dikatakan sebagai salah satu nikah yang sangat terlarang bahkan terlihat sumbang pandang dalam masyarakat jika terjadi, karena

¹ Darjo, *op.cit*

akan banyak perbandingan terhadap adik / kakak tersebut. sehingga akan menjadi bahan pembicaraan orang.

Nasib baik dan nasib kurang baik sebenarnya bukanlah masalah adat, itu sebenarnya masalah takdir, tetapi karena kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan seolah-olah takdir dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Sebab dalam kehidupan selalu diikuti oleh garis hidup dan takdir.

Dalam pernikahan *Gotong Wali* tersebut, dalam hukum adat hal ini di pandang sebagai suatu perbuatan yang tabu di mata masyarakat, karena nantinya diikuti oleh ketentuan-ketentuan takdir yang tidak diinginkan. Bagi anak yang tetap melakukan nikah *Gotong Wali* maka mau tidak mau salah satu harus rela untuk tidak dibiayai, dan orang tuanya tidak menjadi wali di dalam pelaksanaan pernikahannya untuk menghindari *Kualat* yang akan menimpanya.²

Menurut Bapak M.Nur bahwa nikah *Gotong Wali* itu dilarang karena, akan menimbulkan hal-hal Negatif dimata masyarakat selain menimbulkan dampak Negatif bagi kedua belah pihak tersebut, masyarakat akan memandang hal tersebut sebagai peristiwa yang misterius, karena hal itu jarang terjadi dikalangan masyarakat. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan meskipun ia telah berusaha keras dalam membina kehidupan rumah tangga.³

² *Ibid.*

³ M.Nur, Tokoh Masyarakat Jawa, *wawancara*, (Pancuran Gading: 10 Oktober 2008).

Namun menurutnya pernikahan yang dilakukan semacam ini bukan berarti merusak pernikahan menjadi tidak sah. Pernikahan tetap sah hanya saja akan memberi dampak buruk kepada keluarga itu sendiri.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nikah *Gotong Wali* merupakan suatu hal perbuatan yang dilarang oleh adat. Namun menurut peraturan hukum Islam pernikahan semacam itu tidak ada masalah meski nantinya akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk dan malapetaka bagi kedua belah pihak dan keluarga. Sebab dalam kehidupan ini suatu yang dilarang pastia ada sebabnya dan apabila dilanggar pasti ada akibatnya, dan suatu yang disuruh itu karena ada hikmah dan manfaatnya.

Pelanggaran terhadap hukum adat kadangkala harus memutuskan hubungan persaudaran sesama keluarga, padahal hukum Islam sendiri tidak pernah memandang bahwa adat itu harus selalu dipertahankan sebagaimana mestinya. Meskipun pelanggaran adat ini tidak akan mendapat ancaman dan hukuman seperti pelanggaran hukum Islam, namun dalam kehidupan yang masih kuat dengan adat istiadat pelanggaran tersebut merupakan suatu hal yang sangat vatal di mata masyarakat, bagi orang yang melanggar peraturan adat maka ia akan di cap sebagai orang yang “ Tidak Beradat “.

Jika seseorang yang telah dikatakan sebagi orang yang tidak beradat, maka orang tersebut tidak ada lagi harga dirinya di muka masyarakat, ia akan menjadi orang yang terkucil dan asing bagi masyarkat sekelilingnya.

Begitu kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan sehingga dalam pelaksanaan sesuatu kadang-kadang masyarakat harus memperhatikan dan mengetahui sisi Positif dan Negatifnya terlebih dahulu.⁴

B. Pengertian Nikah Menurut Hukum Islam

Nikah berasal dari bahasa arab نكاح- ينكح- نكاحا menurut bahasa yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fiqih dinyatakan bahwa nikah menurut Bahasa memiliki arti Hakiki dan Majazi. Menurut arti Hakiki nikah adalah “ *Bergabung* “ atau *Bercampur*” الضم والتداخل sedangkan arti Majazinya “ *Bersetubuh* “⁵ الوطى. Kata nikah yang tersusun dari huruf nun, kaf, alif, hak, bisa memberikan sebuah makna: (ن) artinya: naumun nikmatun (tidur yang nikmat), (ك) artinya: kamilatun (sempurna), (ا) artinya : ulfatun (kasih sayang), (ح) artinya: hikmatun (berfaidah).⁶ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

1. Abu Zahra dalam kitab Al- Ahwal Al-Syakhsya mendefenisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Majahib Al-Arobah*, (Mesir : Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubroh, 1969), Cet. Ke-4, Juz IV, h.2.

⁶ Ibnu Abdul Ghofar, *Nikah Seks Islam* , (Kediri : 4 Desember 2004), Cet. Ke-1, h.15.

wanita yang saling mencintai, saling membantu yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁷

2. Prof. Dr. Hazairi mendefinisikan bahwa inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual menurut beliau tidak ada akad nikah (perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual.⁸
3. T.M. Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa pernikahan adalah melaksanakan akad yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan atas kerelaan kedua belah pihak yang berdasarkan sifat yang ditentukan syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga dan menjadikan seorang cendrung kepada yang lain.⁹
4. Golongan Hanafiyyah mengartikan nikha dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Berarti seseorang dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan.¹⁰
5. Golongan Malikiyah, pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti Mut'ah atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga.¹¹

⁷ M.Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, (Mesir : Dar Al-Fikri, 1967), Cet. Ke-3, h.8.

⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tinta Mas, 1961), Cet. Ke-5, h.61.

⁹ T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet. Ke-2, Jilid 2, h. 246.

¹⁰ Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 9.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubro, 1969), Cet.5, Juz IV, h.2.

6. Golongan Syafi'iyah mengartikan dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang disamakan dengan keduanya. Imam Syafi'i mengartikan dengan aqad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan kabul dari pihak laki-laki.¹²

عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الإنكاح أو التزويج

Artinya : “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.”¹³

7. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa).¹⁴
8. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqah Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵
9. Muhammad Abu Ishrah mengatakan bahwa nikah adalah: Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong

¹² *Ibid.*

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Mai, 2004), Cet. Ke-7, h.37.

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP. 9 Tahun 1975, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), Cet. Ke-1, h.1.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 22 Juli, 1991), Cet. Ke-1, h.20.

dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.¹⁶

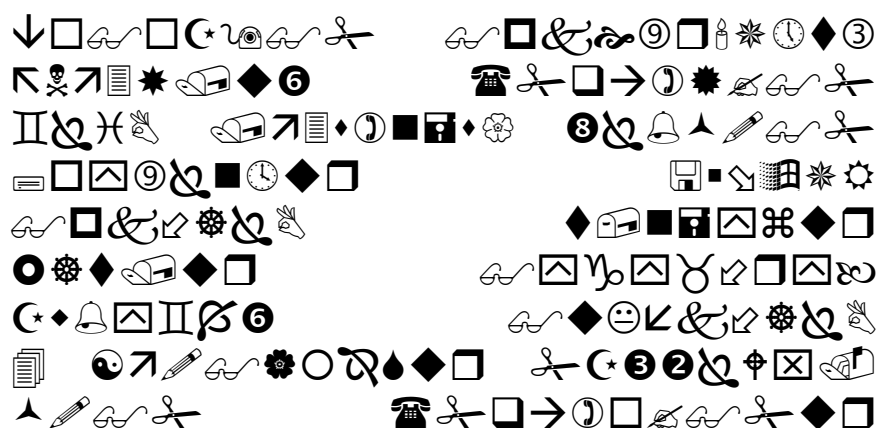
Dari beberapa pengertian nikah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridoi Allah SWT.

C. Dasar Dan Hukum Nikah

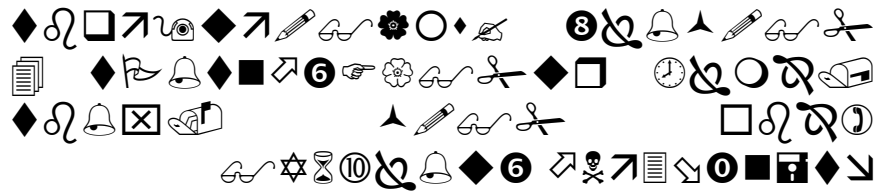
a. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawian merupakan kodrat alamiyah dan Sunnatullah yang diatur sedemikian rupa melalui rukun dan syarat yang di tentukan, hukum Islam telah memberikan pedoman ketetapan-ketetapan tentang dasar perkawian (*Munakahat*) hal ini dapat di temukan sumbernya dalam al-Qur'an maupun Hadis, seperti tersebut dibawah ini :

1). Surat an-Nisa Ayat 1:



¹⁶ Murni Djamal, MA, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Mai, 1983), Cet. Ke4, h.49.



Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istri baginya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu minta satu sama lain sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa : 1)”¹⁷

2). Surat an-Nisa Ayat 3:

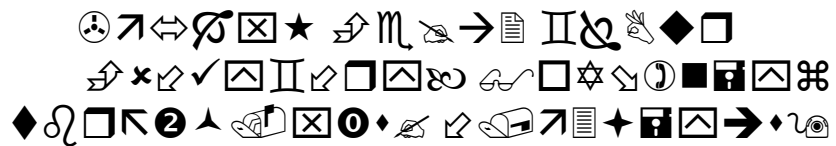


Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, tapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. an- Nisa : 3).”¹⁸

¹⁷ Depag RI, *op.cit*, h.114.

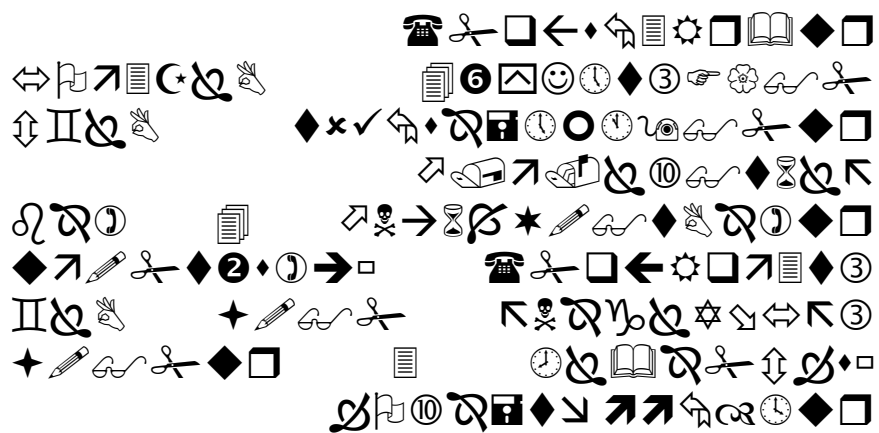
¹⁸ *Ibid*, h.115.

3). Surat Al-Zariat Ayat 49:



Artinya : “Dan segala sesuatu yang telah kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaranku.”¹⁹

4). Surat an- Nur Ayat 32:



Artinya: “Nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu orang yang layak kawin dari hamba kamu baik laki-laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin maka Allah akan memampukan mereka dari karunianya. Dan Allahmaha luas pemberian nya lagi maha mengetahui.”²⁰

5). Didalam Hadis Rasulullah Bersabda:

تزوجوا الودود الودود فإنى مكاثر الأنبياء يوم القيامة

Artinya: “Kawinilah perempuan pecinta lagi bisa banyak anak agar nanti dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat nanti. (HR. Ahmad).”²¹

¹⁹ Ibid, h.862.

²⁰ Ibid, h. 549.

²¹ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadis Pilihan*,(Surabaya: Januari, 1980). Cet. Ke-1, h.

6). Didalam Hadis Rasulullah Bersabda:

عن ابن مسعود قال لنا رسول الله ص.م يامعشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a beliau bersabda : wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu bisa membentengi diri” (HR. Bukhari)²².

7). Didalam Hadis Rasulullah Bersabda:

عن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوَّج. وقال بعضهم: أصلي ولا أنام. وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكنني أصوم وأفطرو، وأصلي وأنام، وأتزوَّج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

Artinya: “Dari Anas. Bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang salah seorang di antara mereka berkata “ aku tidak akan menikah “ yang lainnya berkata “ aku akan selalu sholat malam dan tidak tidur” yang lainnya lagi mengatakan,” aku akan selalu berpuasa dan tidak berbuka.” Kemudian hal itu sampai kepada rasulullah maka beliau bersabda : mengapa ada orang – orang yang mengatakan begini dan begini ? padahal aku sendiri berpuasa dan juga berbuk, aku sholat malam dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita barangsiapa yang tidak suka sunahku maka ia bukan dari umatku (Muttafaq ‘Alaih)²³.

²² Imam Bukhari, *Al-Bukhari* (Dar-Al-Fikr, 1981), Cet.4, Jilid V, h. 117.

²³ Al Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, November, 2006), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 404.

9). Didalam Hadis Rasulullah Bersabda :

عن ابي هريرة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة
لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت
يذاك (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Dari Nabi SAW, Bersabda: Dikawini perempuan karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka akan selamatlah engkau”.²⁴

2. Hukum Perkawinan

Dasar hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian fuqaha adalah mubah atau ibahah. Namun dasar hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah berdasarkan sebab-sebab (*Ilatnya*) yakni dapat berubah menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.²⁵

Berdasarkan sebab-sebab tersebut hukum perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak tetapi belum

²⁴ Hussain Bahreisy, *Himpunan Hadis Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya: Januari, 1980), Cet. Ke-1, h.312.

²⁵ M. Idris Ramulyo, SH. MH, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Cara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. Ke-7 h.21.

ada biaya untuk hidup sehingga dia menikah hanya akan membawa kesengsaraan istri dan anak-anaknya maka makrulah baginya untuk menikah. Tetapi andaikan dia menikah juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabilla tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan maka dia mendapat pahala.

Demikian juga bagi wanita, meskipun diketahui dia telah wajar untuk menikah tetapi dia belum sanggup menjalankan kewajiban seorang istri maka makruh baginya untuk menikah.

b. Sunnah

Dipandang ari segi pertumbuhan pisik atau jasmani seorang peria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar untuk hidup sederhana. Maka baginya sunnah untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah mendapat pahala dan tidak berdosa jika tidak atau belum menikah.

c. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Imam hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.²⁶

d. Wajib

²⁶ *Ibid.*

Apabila seorang pria di pandang dari segi fisik atau jasmaninya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan dari segi biaya kehidupan telah mampu dan mencukupi sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya akan terjerumus kedalam penyelewengan seksual maka wajiblah baginya nikah. Bila mana dia tidak menikah akan berdosa di sisi Allah. Demikian juga wanita yang tidak dapat mengendalikan diri dari perbuatan orang jahat bila tidak menikah maka wajiblah baginya untuk nikah.²⁷

Menurut mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan :

- a. Apabila seorang lelaki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah
- b. Apabila dia tidak mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejala nafsu syahwatnya.
- c. Apabila seorang lelaki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
- d. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal.
- e. Haram

Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban sebagai suami istri, atau seorang pria ingin menganiaya

²⁷ *Ibid.*

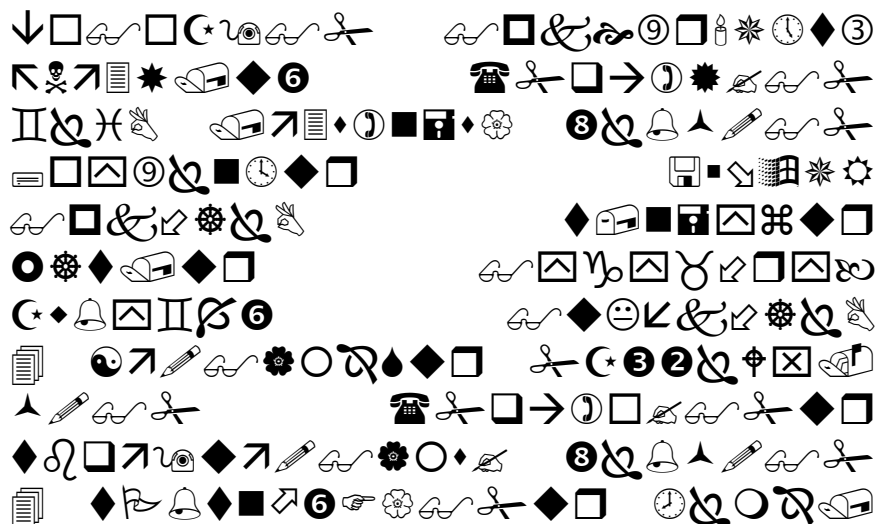
wanita atau sebaliknya ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan untuk menikah.

Menikah juga diharamkan bagi seorang lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anak-anaknya, atau dia menderita penyakit yang cukup gawat dan akan menular kepada istrinya dan keturunannya.²⁸

3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan.

Ada beberapa tujuan dan hikmah perkawinan atas umat islam, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Allah berfirman didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 1.²⁹



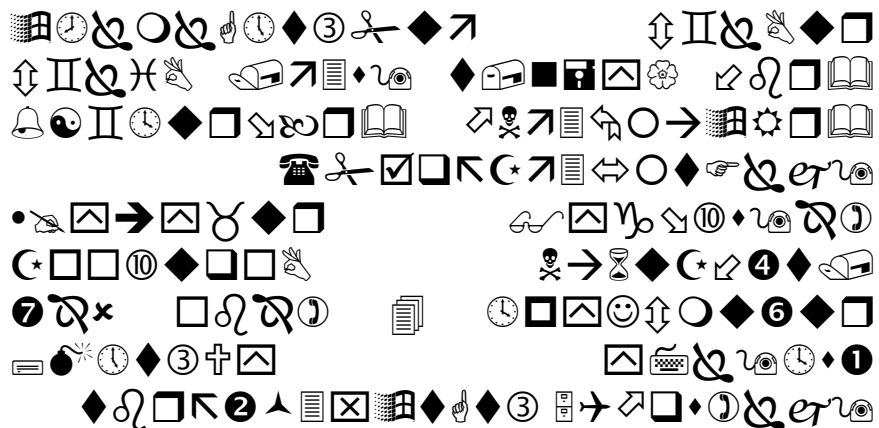
²⁸ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h.46.

²⁹ *Ibid.*



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”³⁰

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang hal ini di jelaskan didalam surat ar-Rum ayat 21.³¹:



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³²

D. Rukun Dan Syarat Nikah

³⁰ Depag RI, *op.cit.*,h.114

³¹ Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

³² Depag RI,*op.cit.*, h.644

Islam adalah agama yang lengkap, maka di dalam segala gerak manusia sudah ditentukan oleh syariat yang telah ditentukan Allah SWT, termasuk dalam hal perkawinan.³³ Maka didalam hukum islam pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut

1. Calon Suami

Dengan Syarat:

- a. Bukan muhrim (sedang melaksanakan ihram walaupun di wakikan)
- b. Tidak di paksa (makruh dengan segala ketentuannya) selain paksaan yang di benarkan oleh syara
- c. Jelas (tertentu) sehingga jikalau menyebutkan dua laki-laki tanpa di tentukan salah satunya.
- d. Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas sifat laki-lakinya.

2. Calon Istri

Dengan Syarat:

- a. Bukan muhrimah
- b. Jelas sifat wanitanya
- c. Sudah tertentu
- d. Tidak dalam ikatan / Iddah orang lain.

2. Shighat (transaksi)

Dengan Syarat:

³³ Selamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, h.63.

- a. Harus dengan ungkapan yang sharih (jelas) , tidak boleh dengan kinayah. Pelaksanaan ijab harus di lakukan walinya sendiri atau di wakilkkan.
- b. Harus bersambung (mutasil) antara lafadz ijab dan qabul, maksudnya tidak ada selingan di antara keduanya.
- c. Tidak di ta'liqkan (digantungkan)
- d. Tidak di batasi dengan waktu.

3. Wali

Dengan syarat :

Dari pihak calon pengantin wanita atau wakilnya.

4. Dua saksi

Sebuah pernikahan tidak akan pernah sah tanpa adanya wali dari pihak wanita, baik wali Khos (khusus) atau Am (umum) dan dua saksi.

Syarat-syarat dari keduanya adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Laki-laki
- e. Adil ³⁴

5. Mahar

Mahar (mas kawin) hukumnya adalah wajib sedangkan menyebutkan dalam akad hukumnya adalah sunnah. Sebaiknya mas kawin itu adalah:

³⁴ Ibnu Abdul Ghofar, *Nikah Seks Islam*, (Kediri: 4 Desember, 2004), Cet. Ke-1, h.20.

- a. Mahar itu tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal.
- b. Suami yang menyetubuhi istrinya sebelum ia tahu besar kecilnya mahar, wajib membayar mahar misil.
- c. Jikalau mahar rusak sebelum di terima, maka istri boleh memilih antara rusak dan sahnya mahar.
- d. Mahar di haruskan dari sesuatu yang bisa dijadikan mobi' (barag yang bisa dijual).³⁵

Menurut Syafi'i menyatakan bahwa Rukun Nikah itu ada lima yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat

Sedangkan Rukun Nikah Menurut Imam Malik ada lima yaitu:

- a. Wali
- b. Mahar
- c. Suami dan istri
- d. Sighat.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Calon Suami

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Husain al-Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), Cet.Ke-1, h.230.

b. Calon Istri

Bagi calon kedua mempelai harus memenuhi persyaratan:

1. Harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU.No. 1 tahun 1974, yakni kedua calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon siistri 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 UU. No. 1 tahun 1974.

c. Wali Nikah

Bagi wali nikah harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan aqil baligh
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim

d. Dua Orang Saksi

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Adapun yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Sanksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab dan kabul.

Ijab dan qabul antara dua calon, mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali kekerabatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.³⁷

E. Kedudukan wali dalam pernikahan

1. Pengertian Wali

Secara etimologi wali berakar dari kata “ولاية” yang dalam istilah fiqh di sebut wilayah berarti penguasaan dan perlindungan.³⁸ Di dalam ensiklopedi islam dikatakan bahwa wali sangat erat kaitannya dengan

³⁷ Munawir Sjadzali, *Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta: 22 Juni 1991), Cet. Ke-1, h. 24.

³⁸ Kamal Mukhtar, *op.cit.*, h. 92.

akar kata “ (ولى زلياً وولاية) “ berarti kekuasaan, pemerintahan, atau

kekuasaan seorang gubernur pada sebuah wilayah atau propinsi.³⁹

Sedangkan secara istilah, wali adalah: penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sedangkan orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali.⁴⁰

Didalam pernikahan, perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’I atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴¹

Para ulama berbeda pendapat dalam memposisikan wali dalam pernikahan. Imam Syafi’I berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan berada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hal itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan janda itu tanpa persetujuannya. sebaliknya wanita itu juga tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa persetujuan dan restu sang wali. Ketentuan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, :

³⁹ Grill Glass, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-2, h. 429.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *loc.cit.*

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fihq Sunnah, Terjemahan Mahyudin Syaf*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), Cet. Ke-3, Jilid Ke-5, h. 20.

عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت
 بغير اذن وليها فنكحها باطل, فنكحها باطل, فنكحها باطل, فإن دخل
 بها, فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فإلى سلطان ولي من
 لأولى له (رواه الخمسة الا النسائي)

Artinya: “Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda” wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, Apabila suami telah menggaulinya, maka ia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakimlah yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali”.⁴²

Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda dengan syarat orang yang dipilihnya itu sepadan (sekufu) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar misil. Tetapi apabila ia memilih suami yang tidak sepadan dengannya dan maharnya kurang dari mahar mitsil, maka wali berhak untuk menentanginya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

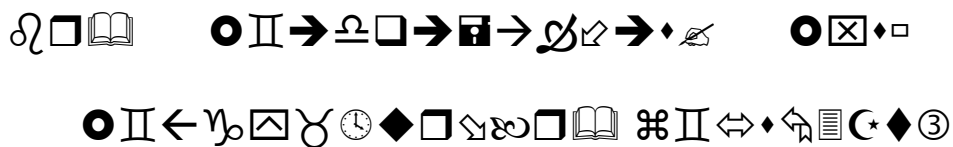
Imam malik mengatakan boleh nikah tanpa wali bagi wanita yang hina dan namun tidak boleh dilakukan oleh wanita yang mulia.⁴³

Sedangkan mayoritas ulama Imamiyyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat disebabkan oleh kebalighan dan

⁴² Al Imam Asy-Syaukani, *opcit.*, h. 427.

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet, Ke-2,

kematangan itu berhak melakukan segala bentuk transaksi termasuk soal pernikahan baik masih perawan maupun sudah janda. Baik punya wali atau tidak, direstui atau tidak, kawin dengan kalangan bangsawan maupun dengan rakyat jelata, mempunyai kelas sosial tinggi maupun rendah tidak seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Ia mempunyai hak yang sama persis dengan kaum laki-laki. Para penganut Imamiyyah berargumen dengan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat : 232.⁴⁴



Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”⁴⁵

Meskipun terdapat perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama. namun mereka tidak menolak wali sebagai seorang yang harus hadir dan sangat diperlukan di dalam pernikahan. Bahkan mereka sepakat apabila anak perempuan yang menikah tanpa sepengetahuannya dan ternyata calon suami tersebut tidak sekufu maka wali berhak meminta kepada qadhi untuk membatalkan pernikahan yang dilaksanakan.

⁴⁴ Muhammad Jawad Al-Mughiniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terjemahan Mansykur AB dkk*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), Cet. Ke-5, h. 345.

⁴⁵ Depag RI, *op.cit.*, h.56.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, dikatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁶

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wali adalah wajib untuk dihadirkan sewaktu akad nikah diucapkan. Wali adalah suatu ketentuan hukum syara yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain.⁴⁷

2. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Ada beberapa macam orang yang dapat bertindak sebagai wali nikah Yaitu;

- 1). Wali Nasab yaitu, wali yang hak perwaliannya disebabkan adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bias wali aqrab dan ab'ad (saudar jauh dan dekat). Wali nasab terdiri dari empat kelompok, urutan kedudukan kelompok yang satu didahului dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

⁴⁶ H. Munawir Sjadzali, *loc.cit.*

⁴⁷ Jaman Nur, *Fihq Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. Ke-3, h. 67.

Kelompok Pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kelompok Kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

Kelompok Ketiga adalah kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

Kelompok Keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek, keturunan anak laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan

mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁸

2). Wali Hakim yaitu apabila wali nasab tidak mungkin untuk dihadirkan atau tidak mau menikahkan lantaran takut atau enggan maka hakim adalah seorang yang bisa menggantikan posisi wali nasab untuk menikahkan seorang perempuan. Wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila:

- a. Ada pertentangan di antara wali itu
- b. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan (adhal).⁴⁹

Syariat Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghindari kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan itu adalah wajar, karena wanita itu ingin dinikahkan kepada laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sedangkan wali nasab tidak ada atau tidak mau menikahnya. Apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.⁵⁰

Didalam sebuah hadis disebutkan yang isinya tidak dapat menunda masalah ini manakala sudah wajar : Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁸ H. Munawir Sjadzali, *loc.cit.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Jaman Nur, *Fihq Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993),Cet. Ke-3, h. 73

ثلاث لا يؤخرن ومن الصلاة اذا اثت والجنزة اذا حضرث والايم

ادا وجدن كفوا

Artinya : “Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu: sholat bila telah tiba waktunya, jenazah apabila telah siap untuk di kebumikan, dan perempuan bila ia telah ditemukan dengan pasangan yang sepadan. (H.R. Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib).”⁵¹

F. Walimatul’ urusy

1. Anjuran Walimatul Urusy

Al-walimah diambil dari kata walama, yang artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri. Sedangkan’urusy ialah pesta perkawinan, yaitu perayaan yang diselenggarakan untuk merayakan perkawinan dan memeriahkannya sebagai tanda gembira atas terjadinya perkawinan.⁵² Menurut Ibnu Abdul Ghofar Walimah adalah meminta do’a restu agar pernikahan kedua mempelai bias rukun, langgeng dan sejahtera dalam mengarungi rumah tangga yang begitu rumit. Dan yang paling inti adalah menyiarkan bahwa kedua mempelai telah melaksanakan akad yang sah, agar di kemudian hari tidak timbul fitnah. Dasar utama dalam walimah adalah hadis Nabi yang diucapkan pada Abdurrahman bin Auf:⁵³

قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة (رواه الجماعة)

⁵¹ Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 406.

⁵² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihyaul Kitab Al-Adabiyah), Cet. Ke-3, h.492.

⁵³ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h. 30.

Artinya:”Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman,“
selenggarakanlah walimah walaupun dengan menyembelih
satu kambing” (HR. Jama’ah)”.⁵⁴

Hadis inilah yang akhirnya menimbulkan perkhilafan dalam menghukumi Sunnah dan Wajibnya walimah. Menurut mayoritas ulama adalah Sunnah Muakkad (yang dikukuhkan), sedangkan Muqobilnya adalah Wajib atau fardu ain.⁵⁵

Adapun Waktu walimah para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Al-qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat Madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Sedangkan Ibn Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur).⁵⁶

Yang jelas untuk pelaksanaan walimah boleh dilakukan ketika akad atau sesudahnya, yang penting tidak sebelum akad.⁵⁷

2. Hukum Menghadiri Undangan Walimatul Urusy

Dalam hal memenuhi undangan walimatul urusy tidak semuanya wajib karna yang wajib adalah Menghadiri undangan Walimatul’urusy

⁵⁴ Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 498.

⁵⁵ Ibnu Abdul Ghofar, *loc.cit.*

⁵⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *op.cit.*, h. 99.

⁵⁷ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h. 31.

dalam pernikahan sedangkan Walimatul Khitan hukumnya adalah Sunnah.⁵⁸ Sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim:

عن ابني عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى
الوليمة فليأتيها(رواه البخاري)

Artinya:“Dari Ibn Umar: Rasulullah bersabda” Jika seseorang
diantarmu di undang pada walimah (pesta perkawinan) maka
datangilah.(RH. Bukhari)” .⁵⁹

Didalam Hadis lain dikatakan tentang keutamaan menghadiri
undangan Walimatul Urusy sebagaimana sabda Nabi :

عن أبي هريرة قال: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ
وَيَتْرَكَ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
(متفق عليه)

Artinya: “Rasulullah bersabda “ Barang siapa yang diundang lalu
tidak memenuhi, maka ia telah durhaka terhadap Allah dan
Rasulnya, dan barang siapa yang datang tanpa di undang,
berarti ia datang sebagai pencari dan keluar sebagai penipu”
(HR. Abu Daud).”⁶⁰

Syarat wajib mendatangi Walimatul’ Urusy adalah;

Pertama: Undangan bersifat umum, baik pada kerabat, tetangga,
kawan, yang kaya maupun yang miskin. Tidak hanya
mengundang satu kelompok dan mengabaikan yang

⁵⁸ Ibid, h.31.

⁵⁹ Hussein Bahreisy, *op.cit.*, h. 316.

⁶⁰ Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h 501.

lainnya, semisal yang diundangan hanya yang kaya-kaya saja, karena berdasarkan Hadis riwayat Imam Muslim.⁶¹

عن أبي هريرة قال: شرُّ الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء, ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.(متفق عليه)

Artinya “Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang kaya-kaya di undang namun orang miskin ditinggalkan barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah durhaka terhadap allah dan rasulnya.(Muttafaq Alaih).”⁶²

Kedua: Undangan di sampaikan untuk hari pertama pernikahan.

Untuk undangan hari kedua hukumnya Sunnah dan hari ketiga Haram atau Makruh, hal ini picu oleh Hadis Nabi:⁶³

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به). (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra, ia berkata: Rasullullah SAW bersabda, Makanan Walimah dihari pertama adalah wajib, di hari kedua adalah sunnah, di hari ketiga adalah sum,ah barangsiapa berharap agar di degar manusia maka Allah akan mendengarkannya. (H.R. At-Tarmizi).”⁶⁴

Ketiga :Tidak ada kemaksiatan atau kemungkaran di tempat walimah, seperti minum-minuman, tari-tarian, atau musik-musikan

⁶¹ Ibnu Abdul Ghofar, *loc.cit.*

⁶² Al Imam Asy-Syaukani *op.cit.*, h. 500.

⁶³ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h. 32

⁶⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *op.cit.*, h.498.

yang dilarang agama. Ketika dijumpai kemungkaran maka hukumnya tidak wajib atau tidak sunnah didatangi, bahkan bisa haram. Namun bila dengan kedatangannya (orang yang di undang) kemungkaran akan sirna, maka lebih utama menghadiri walimah.

Didalam Hadis di katakana.⁶⁵

عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما، فدعوت رسول

الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في البيت تصاوير فرجع

(رواه ابن ماجه)

Artinya:”Dari Ali RA, ia mengatakan “ Aku membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah SAW, beliauapun datang, lalu beliau melihat gambar-gambar di dalam rumah, maka beliau kembali lagi “ (HR. Ibnu Majah).”⁶⁶

Keempat:Kedatangannya tidak takut hilangnya pangkat atau malahan mengharapkan diangkatnya pangkat.

Kelima: Kehadirannya kewalimah tidak menyakitkan hatinya karena berbagai faktor, seperti ia bekas pacar salah satu mempelai.

Keenam:Undangan disampaikan dengan jelas dan khusus oleh si pengundang atau utusannya. Apabila model mengundangnya membukakan pintu dan berkata ”*Mari silakan masuk bagi siapa saja yang mau*” maka hukum menghadirinya tidak sunnah.

⁶⁵ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h.32.

⁶⁶ Al Imam Asy-Syaukani *op.cit.*, h. 507.

Ketujuh: Orang yang mengundang bukan non muslim.

Bila yang di undang dalam keadaan puasa sunah, maka lebih utama berbuka. Sedangkan makanan yang di suguhkan hanya boleh di makan saja, tanpa harus menunggu di persilahkan.

Apabila yang mengundang banyak, maka yang harus di hadiri adalah yang paling dahulu mengundang, dan ketika bersamaan maka penuhilah yang ada hubungan keluarga, kemudian tetangga rumah yang palingdekat sampai akhirnya *Qur'ah* (diundi)⁶⁷

Didalam Hadis Rasulullah Bersabda:

عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الدّاعيان فأجب أقربهما بابا، فإن اقربهما بابا أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya : “ Apabila ada dua undangan bersamaan, maka penuhilah yang lebih dekat pintunya. Karena yang lebih dekat pintunya adalah lebih dekat hubungan tetangganya. Apabila salah satunya lebih dahulu maka penuhilah yang lebih dulu mengundang ” (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁶⁸.

3. Hikmah Di Adakannya Walimatul Urusy

Adapun walima ini dianjurkan karena mengandung beberapa hikmah:

- 1) Merupakn rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- 3) Sebagai tanda resmi adanya hidup baru bagi suami istri.

⁶⁷ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h.33.

⁶⁸ Al Imam Asy-Syaukani *op.cit.*, h. 504.

4) Sebagai Realisasi Sosiologi dari akad nikah.⁶⁹

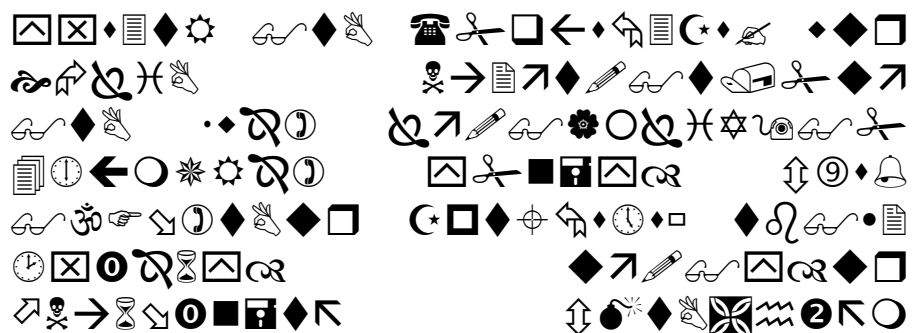
Dari hikmah diadakannya Walimah Urusy, ternyata memiliki makna yang cukup tinggi karna walimah untuk perkawinan sangat di anjurkan sekali bagi orang yang melangsungkan pernikahan.

G. Bentuk-bentuk nikah yang di larang

Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syari'ah dalam rangka membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan umat yang ideal ini, al-Quran dan sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinanyang dapat dibagi ke dalam dua kategori pertama, larangan yang bersifat tetap dan yang kedua, larangan yang berlaku sementara.

1. Larangan Yang Bersifat Tetap (*Muhrim Muabbad*), yaitu muhrim yang terlarang untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan karna nasab, keturunan, musaharoh, dan persususan.⁷⁰

Adapun larangan kawin karna *Muhrim Muabbad* ini, tercantum di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 22-23, sebagai berikut:



⁶⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 45.

⁷⁰ Husain al-Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1981), Cet. Ke-1, h. 230

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷¹

Dari ayat diatas, larangan untuk menikahi Muhrim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1) Sebab *Nasab* (Keturunan) Atau Adanya Pertalian Darah Yaitu:

- a. Ibu, nenek (dan seterusnya menurut garis lurus keatas)
- b. Anak perempuan, cucu perempuan (dan seterusnya kebawah)
- c. Saudara perempuan baik seayah atau seibu.
- d. Saudara perempuan ayah baik sekandung, seayah atau seibu
- e. Saudara perempuan ibu baik sekandung, seayah atau seibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan baik sekandung, seayah atau seibu.

2) Sebab *Mushahahah* (Persemendaan) Karena Hubungan Kekeluargaan

- a. Istri ayah (ibu tiri) baik sudah digauli atau belum

⁷¹ Depag RI, *op.cit.*, h. 120.

- b. Istri anak atau menantu dan istri cucu, baik cucu dari anak laki-laki atau perempuan, baik istrinya sudah di campuri atau belum
- c. Ibu dari istri atau mertua, baik ibu kandung maupun ibu susuan , baik perempuan tersebut diceraikan sesudah dicampuri atau belum.⁷²

3) Sebab *Radha'ah* (Sesusuan)

- a. Ibu yang menyusukan
 - b. Anak perempuan dari ibu yang menyusukan
 - c. Anak perempuan dari anak perempuan yang menumpang menyusu
 - d. Saudara perempuan dari ayah susuan
 - e. Saudara ibu perempuan yang menyusui
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan susuan
 - h. Anak perempuan dari ibu tiri (istri bapak susuan)
2. Larangan Yang Berlaku Sementara (*Muhrim Muwaqqat*), yaitu muhrim yang terlarang kawin dalam jangka waktu tertentu disebabkan adanya hal-hal tertentu yang bila hal tersebut hilang maka hilang pulalah keharamannya.⁷³

Larangan sementara untuk menikah adalah larangan yang dapat di batalkan dengan adanya perubahan kondisi. Larangan-larangan kondisional itu adalah sebagai berikut:

⁷² *Lo.cit.*

⁷³ *Ibid.*

1) Menikahi Dua Orang Perempuan Yang Bersaudara

Seorang laki-laki tidak boleh menikahi dua orang bersaudara pada waktu bersamaan, larangan sementara ini berubah segera setelah istrinya meninggal dunia. Setelah itu lelaki dapat menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal dunia.

2) Menikahi Wanita Yang Masih Bersuami

Seseorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Namun larangan ini tidak berlaku lagi, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena cerai, setelah habis masa iddahnya

3) Menikahi Wanita Yang Masih Dalam Masa Iddah

Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam masa iddahnya. Larangan ini hilang setelah habis iddahnya

4) Wanita-Wanita Musyrik

Seorang lelaki tidak boleh menikah dengan wanita musyrik namun apabila wanita itu sudah menjadi muslim maka halal untuk dinikahi.

5) Orang Yang Sedang Ihram

Orang yang sedang ihram baik ihram haji maupun ihram ibadah umroh, sebagaimana sabda nabi SAW, yang artinya: “ Dari Utsman Bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan dan tidak pula

meminang. Jika telah selesai ihram maka bolehlah untuk menikah.⁷⁴

Selain dari penjelasan diatas agama islam juga secara tegas melarang beberapa pernikahan diantaranya yaitu :

1. Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak), ditinjau dari segi bahasa *Mut'ah* adalah: berarti bersenang-senang, atau hiburan sementara. sedangkan menurut istilah *mut'ah* adalah ikatan seorang perempuan dengan laki-laki dalam batas waktu tertentu dengan upah / mahar tertentu pula.

Masa pernikahan *mut'ah* paling lama 45 hari, bila masa kontraknya habis maka pernikahan itu putus dengan sendirinya. Pada masa islam *mut'ah* dibiarkan berjalan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada zaman jahiliyah hal ini berlangsung sampai tahun terjadinya perang khaibar yaitu tahun 2 Hijriyah.⁷⁵ Sebagaimana hadis Rosullullah SAW, sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم
الحر الانسية (متفق عليه)

Artinya :“Dari Ali ra. Berkata: “ Rasullullah SAW, melarang nikah *mut'ah* pada perang khaibar dan juga melarang memakan daging keledai peliharaan. (Muttafaq ‘Alaih)”.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*.

⁷⁵ Thalib, 20 *Macam Pernikahan Yang di Murkai Allah*, (Bandung: Maret, 2000), Cet. Ke-1, h. 86.

⁷⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 450.

2. Nikah *Muhallil*, yaitu nikah dengan perjanjian ketika istri sudah di setubuhi akan di talak kembali. Akad tersebut hanyalah sebagai syarat agar suami pertama bisa kembali menikahi lagi bekas istrinya yang ditalak bain (talak tiga).⁷⁷ Atau suatu pernikahan bertujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, agar suami yang pertama dapat kembali kepada istrinya.⁷⁸

Rasulullah bersabda:

عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له

(رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ia menuturkan, “ Rasulullah SAW telah melaknat Muhallil (penghalal) dan Muhallal lahu (yang dihalalkan untuknya).” (RH. Ahmad, an-nasa’I dan at-tirmidzi,)”.⁷⁹

3. Nikah *Sighar* (Barter) atau silang,⁸⁰ secara bahasa adalah tukar menukar barang. Sedangkan menurut istilah adalah mengawinkan anak perempuan dengan cara saling tukar menukar satu pada yang lain, sedangkan farji keduanya sebagai maharnya, atau lebih enak di ungkapkan tanpa mahar.⁸¹

Rasulullah bersabda:

⁷⁷ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h. 44.

⁷⁸ Husain al-Bahresy, *lo.cit.*

⁷⁹ Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 453.

⁸⁰ M. Tolib, *op.cit.*, h. 82.

⁸¹ Ibnu Abdul Ghofar, *op.cit.*, h. 45.

عن نافع عن ابن عمر: ان رسول الله نهى عن الشغار والشغار ان

يزوج الرجل ابنته وليس بينهما صداق (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Nafi, Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang nikah Syigar, adapun yang dimaksud dengan nikah syigor adalah, laki-laki menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar diantara keduanya (RH. Jamaah)”.⁸²

Demikianlah uraian secara garis besarnya tentang nikah-nikah yang di
dilarang dalam Islam baik dilarang di dalam al-Qur'an juga di larang dalam
Hadis Rasulullah SAW.

⁸² Al Imam Asy-Syaukani, *op.cit.*, h. 455.

BAB IV

PEMUTUSAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT

PELANGGARAN *GOTONG WALI* PADA PERKAWINAN SUKU JAWA

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor-faktor Pemutusan Hubungan Kekeluargaan Akibat

Pelanggaran *Gotong Wali*

Pemutusan dalam kamus Indonesia artinya adalah pematah, berpisah, atau tidak berhubungan lagi.¹ Sedangkan hubungan dalam kamus indonesianya adalah berangkai, berkait atau bersambung.² Namun arti pemutusan hubungan yang di maksud di sisni adalah putusnya hak wali orang tua bagi anaknya lantaran anaknya melakukan pernikahan *gotong wali* sehingga salah satu anak kandungnya tidak dapat dinikahkan oleh orang tuanya kandungnya sendiri.

Pemberian hak perwalian terhadap pernikahan salah satu anaknya orang tua menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain yang masih ada hubungan nasab dengan orang tuanya bisa kepada anak laki-lakinya, saudaranya, dan kakeknya dari garis keturunan ayahnya. Juga bisa kepada orang lain apabila tidak ada saudara dekat dari orang tuanya seperti kepada P3NCTR atau wali hakim untuk menjadi wali pernikahan anaknya.

Hal ini dilakukan agar anak tidak mendapat *kualat* atau mala petaka di kemudian hari nanti.

¹ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 489

² *Ibid.*

Nikah adalah merupakan suatu langkah yang terbaik yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapat pasangan hidup, tapi mengapa dalam adat banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Menurut Darjo nikah *Gotong Wali* dilarang adat karena:

1. Merupakan suatu yang tabu di masyarakat
2. Akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga tersebut.

Dikarenakan hal tersebut diatas maka nikah *Gotong Wali* tersebut menjadi terlarang, karena akan banyak menimbulkan dampak Negatif dari pada dampak Positifnya, sebab hal itu bisa saja terjadi pada pihak suami, istri, mertua atau anak diantara keduanya.³

Sedangkan menurut Bapak M.Nur pernikahan yang dilakukan secara bersama atau *Gotong Wali* tersebut dilarang menurut adat disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Kehidupan rumah tangga tidak akan mendapatkan kebahagiaan bagi pelaku yang melaksanakan *Gotong Wali*
2. Renggangnya hubungan dua orang anak dengan orang tua sekaligus.
3. Adanya sumbang pandang masyarakat melihat dua pasang pengantin sekali bersanding.

³ Darjo, Tokoh Masyarakat Jawa. *Wawancara*, (Pancuran Gading: 12 Oktober 2008).

4. Berdasarkan beberapa faktor diatas, maka menurut Bapak Tumijan, sebagai salah satu pemuka adat mengatakan nikah *Gotong Wali* itu dilarang.⁴

Menurut Bapak Marjuki alasan dilarangnya nikah *Gotong Wali* karna, dalam rangkainan pelaksanaan pernikahan suku Jawa pada umumnya memakan waktu yang tidak sedikit baik dalam persiapan nikah, menentukan hari yang baik, maupun dalam upacara pelaksanaan dan yang jelas menelan ongkos atau biaya dan tenaga yang sangat besar. Oleh karena itu segala sesuatunya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang mengecewakan.

Perencanaan yang matang yang memerlukan waktu yang panjang sampai berbulan-bulan dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan untuk masa sekarang sampai-sampai menghabiskan biaya puluhan juta rupiah, di samping itu juga harus mengundang dan menunggu seluruh keluarga berkumpul di mana tempat tinggal keluarga saling berjauhan.

Menurut Bapak Marjuki, ia menuturkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan hal semacam itu dilarang dalam hukum adat secara tertulis tidak ada dijelaskan, hal ini hanya melihat sejarah dan perilaku yang dialami bagi orang yang melakukan nikah *Gotong Wali*, karena mereka mengalami hal-hal yang buruk dan tidak baik maka masyarakat akan menganggap hal itu karena melanggar adat, meskipun sebenarnya itu merupakan takdir, tapi dalam adat takdir seringkali dijadikan objek dalam pelanggaran adat.

⁴ M. Nur, Tokoh Masyarakat Jawa, *wawancara*, (Pancuran Gading), 18 Nopember 2008.

Dalam menjelaskan hukum adat dengan hukum Islam, sebenarnya sungguh jauh berbeda. Hukum adat merupakan hukum atau peraturan yang dibuat oleh masyarakat atau sekelompok orang banyak yang berfungsi untuk menata kehidupan masyarakat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum atau syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

Namun kadangkala hukum adat merupakan hukum yang kuat dipercaya bagi orang yang hidup dalam lingkungan adat yang ketat.⁵

Menurut Bapak Tumino pelanggaran adat merupakan hal yang sangat buruk, sebab bagi yang melanggar adat bisa saja ia dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Beda dengan pelanggaran hukum Islam, kita bisa bertaubat dan minta ampunan secara individu kepada Allah SWT, tapi pelanggaran atas adat kita akan dicap sebagai orang yang “ Tidak Beradat Istiadat “sehingga dimata masyarakat kita tidak ada harganya lagi.⁶

Berdasarkan beberapa keterangan yang dikemukakan oleh beberapa pemuka adat diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai dilarangnya melakukan nikah *Gotong Wali* diantaranya:

1. Merupakan hal yang tabu di mata masyarakat
2. Dapat menimbulkan mala petaka
3. Mengakibatkan putusnya kekeluargaan
4. Tidak terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga.

⁵ Marjuki, (Tokoh Masyarakat Jawa), *wawancara*, (Pancuran GadingC: 20 Nopember 2008).

⁶ Tumino, (Tokoh Masyarakat Jawa), *wawancara*, (Pancuran Gading: 22 Pebruari 2009).

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelanggaran Adat Tersebut.

Menurut Bapak Mursidi, Seperti pernikahan yang dilakukan oleh anaknya yaitu yang bernama (Ismawati dan Indri), Ismawati menikah di Pancuran Gading kampungnya sendiri dan orang tuanya yang menjadi walinya sedangkan Indri menikah di Jambi di tempat suaminya yang menjadi wali nikahnya adalah abangnya pernikahan mereka terjadi pada Bulan Pebruari (Safar) dan Maret (Mulud) Tahun 2008, maka oleh pak Mursidi pernikahan Ismawati dirayakan sedangkan pernikahan Indri tidak di hadiri dan dirayakannya, Karna Indri dianggap bukan anaknya untuk menghindari *Kualat* (Pantang), yang akan nantinya menimpah kelangengan rumah tangganya Indri.⁷

Menurut Sakroni, bahwa dia melaksanakan pesta pernikahan secara bersamaan dengan adiknya, menurutnya pesta pernikahn yang dilakukannya memang agak tabu dan dilarang oleh adat, namun hukum Islam tidak pernah bahkan tidak ada memberi penjelasan tentang larangan nikah secara *Gotong Wali*. Tapi peraturan adat memandang hal itu sebagai suatu perbuatan yang tabu dan akan mendatangkan malapetaka pada kedua belah pihak, mereka tidak akan mendapat kebahagiaan dalam hidup berumah tangga.

Adapun hal-hal yang dialami setelah melaksanakan pernikahan itu menurut Sakroni adalah bahwa salah satu dari mereka ada yang mengalah, tanpa ada suatu sebab dan komplik rumah tangga adiknya pergi

⁷ Mursidi, (Orang Tua Indri Dan Ismawati), *wawancara*, (Pancuran Gading:8 Oktober 2008).

meninggalkan istrinya begitu saja dan setelah beberapa bulan adiknya meninggal dunia. Sedangkan hal-hal yang dialami Sakroni sendiri adalah bahwa ia sering sakit-sakitan dan sulit memperoleh keturunan Menurutny mungkin ini merupakan dampak dari melakukan pernikahan secara *Gotong Wali*. Sebab menurut adat hal itu merupakan suatu yang dilarang karna pada saat itu mereka melaksanakan nikah dan walimah secara bersamaan tanpa ada selang waktu dan pemisahan hari. ⁸

Sedangkan menurut Ponirah bahwa dia juga nikah dengan adiknya Perihatin hanya berselah beberapa bulan saja, walaupun sudah ada larangan dari orang tuannya namun mereka laksanakan juga sehingga hal itu kelihatan agak sumbang dan tabu dalam kehidupan masyarakat. Namun di dalam hal-hal yang Positif pernikahan itu ternyata terdapat hal-hal Negatif yang timbul dari peristiwa itu sendiri.

Sebenarnya adat hanya peraturan yang dibuat oleh masyarakat, menurutnya apa saja yang dibuat oleh manusia pasti tidak akan kekal dan pasti bisa berubah kapan saja. Namun ternyata adat termasuk suatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat meskipun hal itu kelihatan agak sepele.

Adapun hal-hal yang dialami oleh Ponirah adalah bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Ponirah tidak pernah mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup seperti orang lain, padahal suaminya juga bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup, tapi kehidupannya tidak pernah

⁸ Sakroni, (Pelaku Nikah Gotong Wali), wawancara,(Pancuran Gading: 03 Januari 2009).

berlebih, hidupnya hanya sebatas kesederhanaan dan pas-pasan. Menurut dia dan adiknya sudah sama-sama di karunia seorang anak tapi malang anak dari supriatin meninggal dalam usia 8 bulan.⁹

Jika kita melihat takdir, hal itu merupakan ketentuan dari Allah dan sudah merupakan garis hidup baginya. Tapi dalam adat istiadat hal itu di pandang sebagai akibat dari pelanggaran adat. Masyarakat memandang kegajalan-kegajalan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebab selama ini tidak ada hal-hal yang tabu dan menggajal yang terjadi jika tidak ada adat. Dikarenakan adanya adat itu maka timbul pulalah peraturan-peraturan hidup dalam suatu masyarakat baik peraturan yang harus dipatuhi maupun peraturan yang harus di jauhi.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa factor putusnya kekeluargaan akibat nikah *Gotong Wali* dan walimatul' urusy secara bersamaan adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada yang mengalah salah satu dari kedua belah pihak.
- b. Tidak ada kekekalan hidup dalam rumah tangga
- c. Sulit untuk mendapat keturunan
- d. Hidup tidak bahagia dan pas-pasan.

Hal ini berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan yakni melalui penyebaran angket sebanyak 50 eksemplar kepada masyarakat Pancuran Gading serta hasil wawancara maupun pengamatan

⁹ Ponirah, (Pelaku Nikah Gotong Wali), *wawancara* (Mataram:10 Maret 2009).

mengenai pernikahan secara *Gotong Wali* dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini:

TABEL XIII
JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH DENGAN
PERNIKAHAN *GOTONG WALI*

OPINI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Tahu	43	86%
B	Tidak tahu	7	14%
Jumlah		50	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan *Gotong Wali* di Desa Pancuran Gading banyak yang mengetahui hal ini sesuai dengan tabel di atas yang mana 43 atau 86 % responden masyarakat menjawab tahu sedangkan 7 atau 14 % responden menjawab tidak tahu.

Sedangkan pendapat masyarakat bagi pelaku yang melakukan pernikahan dan walimah secara *Gotong Wali* apakah ia mendapat *kualat* atau tidak dapat kita lihat berdasarkan tabel di bawah ini:

TABEL XIV
JAWABAN RESPONDEN TENTANG KUALATKAH ORANG
YANG MENIKAH DAN WALIMAH SECARA *GOTONG WALI*

OPINI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P
A	Ya	40	80%
B	Tidak	4	8%
C	Tidak tau	6	12%
Jumlah		50	100%

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa orang yang melakukan pernikahan dan walimah secara *Gotong Wali* 40 responden menjawab Ya atau 80 %, sedangkan 4 responden menjawab Tidak atau 8 % dan 6 responden menjawab tidak Tau tau 12 %.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat Pancuran Gading sangat takut melanggar adat karna mereka meyakini adat istiadat yang telah di wariskan turun temurun dari nenek moyang mereka itu benar sehingga mereka taati hingga saat ini.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Gotong Wali*.

Dalam ajaran Islam sesuatu yang telah ditetapkan baik berupa perintah maupun larangan sudah menjadi ketetapan yang harus ditaati. Hukum Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk berbuat sesuatu selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan karena adanya adat *Gotong Wali*.

Allah berfirman didalam surat al-Imran Ayat :3

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.....(ال عمران:)

Artinya : “Dan berpeganglah dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai “¹⁰

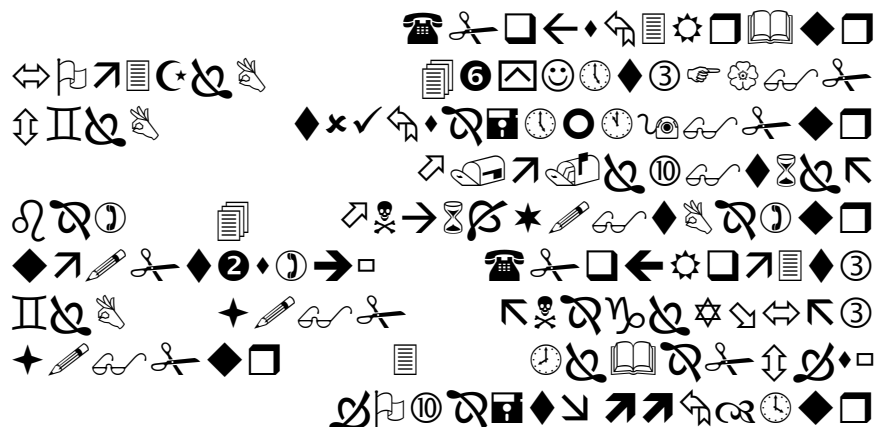
Didalam Hadis Rosulullah SAW, bersabda:

ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه
عن المنكر (رواه احمد والترمذي)

Artinya : “Tidak termasuk golongan umat kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak sayang kepada yang muda, tidak menyeru kepada yang baik dan tidak mencegah dari yang mungkar. (HR. Ahmad dan At-Tarmizi)”¹¹

Dalam ajaran Islam, pernikahan yang dilakukan menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan sudah sah tanpa melihat dampak dari pernikahan tersebut.

Allah berfirman dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32, tentang wanita yang boleh untuk dinikahi yaitu:



Artinya: “Nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu orang yang layak kawin dari hamba kamu baik laki-laki maupun perempuan, apabila perempuan itu miskin maka Allah akan memampukan mereka dari karunianya. Dan

¹⁰ Depag RI., *Op.Cit.* h. 123

¹¹ Hussein Bahreisy, *Loc.Cit.* h.341

Allahmaha luas pemberian nya lagi maha mengetahui.”¹²

Didalam Hadis Rasulullah Bersabda:

تزوجوا الودود الودود فإنى مكاثر الأنبياء يوم القيامة

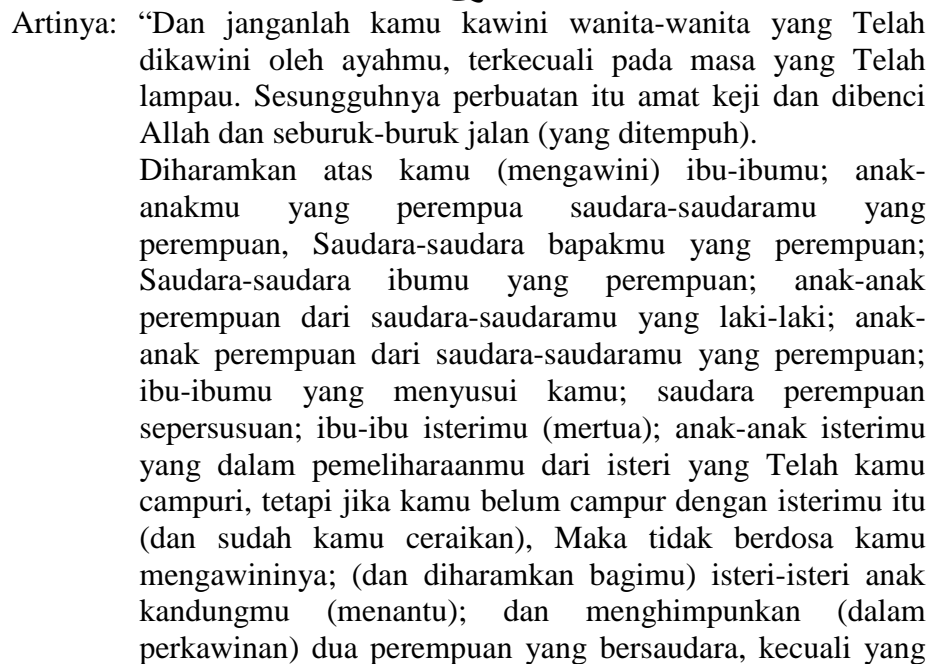
Artinya: “Kawinilah perempuan pecinta lagi bisa banyak anak agar nanti dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti. (HR. Ahmad).¹³

Allah juga telah tegas menerangkan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 22-23 bahwa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu:



¹² .Ibid, h.549

¹³ Hussein Bahreisy, *Himpunan Hadis Pilihan*,(Surabaya: Januari, 1980). Cet. Ke-1, h.



Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁴

Menurut hemat penulis, larangan tentang menikahkan dua orang anak dalam satu tahun atau *Gotong Wali* dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan dan kawin lari karena merasa tidak mendapat restu dari orang tua dan keluarga lainnya.

Untuk menghindari hal seperti itu maka kita harus mengetahui dan memahami adat secara mendalam bertentangan atau tidak dengan syariat Islam karena bisa menjadi Bid'ah yang menyesatkan.

Adat dalam bahasa Arabnya adalah (Urf) adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi teradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁵ sedangkan menurut Sobhi Mahmassani adat adalah sesuatu yang telah berulang kali terjadi, diterima baik oleh perasaan dan akal sehat serta telah berlaku umum di dalam suatu masyarakat di suatu tempat.¹⁶

Menurut WJS Poerwadarminta adat adalah aturan atau norma yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, untuk memelihara kepentingan masyarakat banyak serta menjaga keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Adapun istiadat adalah kebiasaan yang sering dilakukan.¹⁷

¹⁴ Depag RI, *Op.cit.*, h.120

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Desember, 1994), Cet. Ke-2, h.123.

¹⁶ Muhammad Daud Ali S.H, *Hukum Islam*, (Jakarta), Cet.Ke-1, h. 230.

¹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-2, h.15.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tinjauan hukum Islam mengenai hal ini maka akan di uraikan Macam-macam adat, Kahujjahan adat, Syarat-syarat adat.

1. Macam-macam Adat (Urf)

Para Ulama Usul fiqh mambagi adat kepada tiga macam yaitu :

1) Dari segi Objeknya adat/Urf terdiri dari:

- a. al-Urf al-lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz /ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. al-Urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa yakni perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.¹⁸

2) Dari segi cakupannya adat/Urf terdiri dari:

- a. al-Urf al-am yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- b. al-Urf al-khass yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3) Dari segi keabsahannya adat/Urf terdiri dari

- a. al-Urf al-sholih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Quran atau

¹⁸ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-4, h. 236.

Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula mendatangkan mudrat kepada mereka.

- b. al-Urf al-fasad yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.

2. Kehujjahan Adat (Uruf)

Para ulama usul fiqih sepakat bahwa adat yang Shoheh yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara' dapat dijadikan Hujjah dalam menetapkan hukum syara' karena apa yang ditetapkan tidak merusak dan menghilangkan kemaslahatan, namun sebaliknya adat yang dapat merusak kemaslahatan tidak dapat dijadikan sebagai Hujjah (adat al-fasad).

Syarat-Syarat Adat

- a. Adat tersebut berlaku secara umum yaitu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditegah-tengah masyarakat dan keberlakuannya yang dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. Adat tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Adat tersebut tidak bertentangan dengan persoalan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi (dalam hal jual beli)
- d. Adat tersebut tidak bertentangan dengan Nash, sehingga menyebabkan hukum yang dilakukan Nash bisa diterapkan.¹⁹

¹⁹ Nazar Bakry, *Ibid.*

Kaidah di atas bersumber dari sebuah Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مارة المسلمون
حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud ra, telah bersabda Rasulullah SAW apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik maka di sisi Allah juga baik. (HR. Imam Ahmad)”.²⁰

Oleh karena itu diterimanya adat istiadat atau adat kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat apabila memiliki nilai masalah (mendatangkan kebaikan) di samping tidak ada unsur-unsur yang melarangnya, karena sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat secara umum adalah baik juga di sisi Allah.

Akhirnya telah jelas bagi kita adat yang dapat diterima adalah adat yang shohih yaitu adat yang tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

Sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan syariat atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

²⁰ Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad 1*, (Bairut: Maktabah Al-Islam), Cet. Ke-3 h. 379.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan larangan nikah *Gotong Wali* adalah:

- a. Merupakan hal perbuatan yang tabu bagi masyarakat Jawa.
- b. Dapat menimbulkan mala petaka terhadap suami istri, orang tua, dan keluarga.
- c. Tidak terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh perasaan saling mengucilkan satu sama lainnya.

2. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut adalah:

- a. Harus ada yang mengalah salah satu dari kedua belah pihak.
- b. Tidak ada kekekalan dalam rumah tangga.
- c. Sulit untuk mendapatkan keturunan.
- d. Hidup tidak bahagia dan pas-pasan saja.

3. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap *Gotong Wali* adalah: bahwa di dalam Islam tidak ada larangan menikah secara *Gotong*

Wali tetapi Islam hanya mengatur Rukun dan Syarat serta bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam pernikahan oleh karena itu Islam tidak melarang nikah *Gotong Wali* karena adat tersebut merupakan adat yang fasid karna mengharamkan sesuatu yang halal yaitu tidak membolehkan nikah secara bersama-sama adik atau kakak pada hari bulan tahunnya bersamaan walaupun dengan alasan untuk kemaslahatan demi tercapainya tujuan pernikahan yang mulia.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan karya Ilmiah ini maka disini penulis dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan larangan nikah *Gotong Wali* atau *Walimatul Urus* secara bersama yaitu:

- a. Diharapkan kepada masyarakat suku Jawa yang mayoritas beragama Islam untuk dapat melihat adat secara cermat bertentangan atau tidak dengan syariat Allah SWT.
- b. Kepada orang tua kami masyarakat suku Jawa terutama tokoh-tokohnya yang dituakan untuk kiranya selalu memberikan bimbingan pengetahuan tentang adat suku Jawa sehingga dapat di jaga dan dilestarikan sampai anak cucu nanti.
- c. Kepada generasi muda yang akan menjalani pernikahn, diharapkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya baik yang bersifat material maupun Nonmaterial berupa ilmu pengetahuan sehingga tujuan dari pernikahan yang mulia dapat dicapai.

Melalui saran-saran tersebut diharapkan kalangan masyarakat Jawa dalam melaksanakan pernikahan mempersiapkan dan merencanakan dengan sematang-matangnya, sehingga segala sesuatu yang tidak dikehendaki tidak terjadi dan tujuan pernikahan yang mulia dapat tercapai.

DAFTAR TABEL

TABEL I	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SUKU BANGSA TAHUN 2008 / 2009.....	14
TABEL II	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2008 / 2009.....	15
TABEL III	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT KELOMPOK PEMILIH TAHUN 2008 / 2009.....	16
TABEL IV	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2008 / 2009.....	17
TABEL V	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT AGAMA TAHUN 2008 / 2009.....	18
TABEL VI	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SARANA PERIBADATAN TAHUN 2008 / 2009.....	19
TABEL VII	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SARANA PENDIDIKAN TAHUN 2008 / 2009.....	20
TABEL VIII	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT MATA PENCARIAN TAHUN 2008 / 2009.....	21
TABEL IX	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SARANA KESEHATAN TAHUN 2008 / 2009.....	22
TABEL X	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT LEMBAGA PEMERINTAHAN TAHUN 2008/2009.....	23
TABEL XI	: JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SARANA KEGIATAN SOSIAL TAHUN 2008/2009.....	24

TABEL XII : JUMLAH PENDUDUK DESA PANCURAN GADING MENURUT SARANA KEBUDAYAAN TAHUN 2008 / 2009.....	25
TABEL XIII : JAWABAN RESPONDEN TENTANG TAHUKAH ANDA DENGAN PERNIKAHAN <i>GOTONG WALI</i>	73
TABEL XIV : JAWABAN RESPONDEN TENTANG KUALATKAH ORANG YANG MENIKAH DAN WALIMAH SECARA <i>GOTONG WALI</i>	74